

OMBUDSMAN GELAR FGD BAHAS ALPALHANKAM

Jum'at, 25 Juni 2021 - Abdul Muhaimin

Jakarta- Ombudsman menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas tata kelola perencanaan pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) secara daring pada Kamis (24/6/2021). FGD ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perencanaan pengadaan alpalhankam secara lebih spesifik dan mendalam, mengumpulkan data dan informasi tentang proses perencanaan alpalhankam untuk menjadi saran/masukan bagi penyelenggara negara.

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus dalam sambutannya mengatakan bahwa sampai saat ini ada 44 sektor yang diawasi Ombudsman, termasuk pengadaan barang dan jasa. Ia menyampaikan, Ombudsman berinisiatif melakukan pendalaman mengenai perencanaan pengelolaan alpalhankam yang menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir.

"Ombudsman melalui amanat pencegahan maladministrasi ingin melakukan pendalaman dari berbagai narasumber terkait," jelasnya.

Sementara itu Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman Pengampu Substansi Ekonomi dan Lingkungan mengatakan bahwa kehadiran Ombudsman diperlukan untuk pengawalan perencanaan alpalhankam untuk mencegah maladministrasi dalam pengadaan yang menggunakan APBN.

Hadir sebagai narasumber Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI dr. Budi Prijanto, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Deputi Polhukhankam Bappenas Slamet Soedarsono, Asisten Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto, Ketua Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara Muhammad Munir, dan Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta. (NI)